



## Menhub: Tak Ada Istilah Putar Balik

**JOGIA, Radar Jogja** - Meski kasus baru Covid-19 akibat varian Omicron bertambah di Indonesia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak mengeluarkan kebijakan baru terkait pengetatan perjalanan. Terutama menjelang momen Natal dan Tahun Baru, pengetatan yang dilakukan hanya soal protokol kesehatan (prokes).

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 66/2021 dan Adendum Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 24/2021. Persyaratan perjalanan yang harus dipatuhi ialah harus vaksinasi dua kali dan tes antigen 1x24 jam.

"Jadi istilah putar balik dan sebagainya

tidak ada," ujarnya di kompleks Kampus Terpadu Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, Sedayu, Bantul kemarin (18/12).

Selain itu, Menhub juga menginstruksikan Ditjen Perhubungan Darat untuk berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan serta Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) setempat agar melaksanakan pengecekan- pengecekan dokumen perjalanan para pelancong.

▶ *Baca Menhub...* Hal 7



**TERTIB:** Wisatawan memakai masker melintas di Jalan Pasar Kembang, Kota Jogja, kemarin (19/12). Dinas Perhubungan DJI tidak lagi memberlakukan aturan putar balik kendaraan.

## Menhub: Tak Ada Istilah Putar Balik

*Sambungan dari hal 1*

"Harus dilaksanakan secara humanis ya, kita harus jaga bahwa Omicron tidak menyebar kemana-mana, tetapi pergerakan tetap ada. Tidak mudah tetapi kita harus lakukan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dishub DJI, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, cek point di perbatasan wilayah DIJ-Jawa Tengah tetap dilakukan. Bedanya, pada 2020 lalu Kepolisian bersama Dishub mendirikan pos pantau di perbatasan. Sedangkan tahun ini, mereka tetap

melakukan pengawasan dengan mendirikan pos pelayanan. "Tidak ada putar balik kendaraan, tetapi yang ingin masuk ke DIJ harus sehat. Jadi cek point di perbatasan tetap ada, bedanya dulu pos pantau, tetapi sekarang jadinya pos pelayanan," katanya.

Made menambahkan, lokasi pos pelayanan itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya yakni di sejumlah pintu masuk wilayah DIJ. Namun, pos itu sifatnya hanya memastikan jika pelaku perjalanan dalam kondisi sehat. Untuk perbatasan pengecekan syarat perjalanan akan dilakukan Dishub dan

kepolisian. Sebanyak 598 personil gabungan dari Satpol PP dan TNI Polri akan diterjunkan untuk pengawasan selama Nataru. Sebanyak 270 personil ditugaskan untuk mengecek kerumunan yang terjadi fasilitas umum, tempat usaha seperti mall dan restoran.

"Pengawasan terkait penggunaan aplikasi PeduliLindungi di setiap tempat usaha. Kemudian secara acak akan dicek vaksinasi baik masyarakat maupun wisatawan, serta kelengkapan test antigen 1 kali 24 jam atau PCR 3 kali 24 jam," ungkapnya. (kur/wia/pru/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005